



RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
TAHUN 2024

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Tahun 2023



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada RKPD Tahun 2024, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai landasan penyusunan rencana kinerja dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan alat evaluasi kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

BAB II

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada setiap Perangkat Daerah disusun dengan sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 Juli 2023
BUPATI GUNUNGKIDUL

SUNARYANTA



Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 26 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA



BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 15 .

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel sebagai upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan adanya penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan yang baik oleh masing-masing Perangkat Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen perencanaan harus memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain untuk menjamin keberlanjutan pembangunan serta mempertahankan dan meningkatkan prestasi pembangunan yang telah dicapai di daerah. Karena itu, perencanaan tersebut harus disusun berpedoman pada RPJMD dan rencana strategis Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan, sehingga dapat dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat daerah Tahun 2021-2026 sehingga Renja PD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhentikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Penyusunan Renja juga mengacu pada Renja K/L dan Renja Provinsi dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY dengan maksud untuk mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan ditingkat nasional

dengan pembangunan daerah. Realisasi dari perencanaan dalam dokumen Renja Tahun 2024 akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor

- 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
15. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 13 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 19. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu tahun 2024.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, adalah :

1. Mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan mensinergikan program-program pembangunan di Kabupaten Gunungkidul;
2. Memberikan pedoman dan acuan dalam menyusun rencana kerja dan rencana kinerja anggaran Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya manusia, sumber dana, dan sarana prasarana dalam organisasi;
5. Meningkatkan produktivitas dan kinerja Perangkat Daerah untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024. disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. IV. PENUTUP

5.1. Catatan Penting

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi ini juga dimaksudkan untuk melihat apakah penyusunan renja telah mengacu kepada Renstra Perangkat Daerah serta evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2022 ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp5.850.366.874,00 dengan rincian Belanja Pegawai Rp2.473.829.246,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.267.524.870,00, dan Belanja Hibah Rp1.109.012.758,00 meliputi 6 (enam) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) subkegiatan.

Tingkat capaian kinerja program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 92,63% dengan realisasi penyerapan keuangan sebesar Rp5.419.002.771,00.

2.1.1. Realisasi capaian target program dan kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan

Semua Program dan kegiatan telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.

2.1.2. Realisasi capaian target program dan kegiatan tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (98,34 %)
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(99,61 %)
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(100%)

- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD(69,21 %)
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD(99,82 %)
- 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(92,12%)
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (98,79 %)
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (100%)
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (100,00 %)
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (100,00 %)
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (99,86 %)
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (99,75%)
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (99,70 %)
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (99,64%)
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (90,00 %)
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (68,91 %)
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (99,63 %)
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (66,46 %)
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (98,42 %)
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (98,89 %)
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100,00 %)
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (99,90 %)
- g. Penataan Organisasi
 - 1) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (99,90 %)
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (91,59 %)
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah (99,35 %)
 - 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (98,12 %)
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (98,17 %)
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (97,01 %)
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (45,08 %)
 - 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (94,33%)
- 2.1.3. Realisasi capaian target program dan kegiatan tahun 2022 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan

Realisasi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 tidak terdapat target kinerja keluaran dan hasil yang melebihi target.
- 2.1.4. Faktor – faktor yang mempengaruhi realisasi kinerja tahun 2022

Ada beberapa faktor penyebab tidak tercapai, atau melebihinya target kinerja program/kegiatan dari target yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

 1. Penyebab belum tercapainya target kinerja kegiatan :
 - a. Adanya kebijakan pemerintah, baik propinsi, kabupaten, maupun pusat, sehingga program/kegiatan yang sudah direncanakan belum atau bahkan tidak dapat dilaksanakan.
 - b. Pelaksanaan program/kegiatan yang belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
 2. Penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan karena :
 - a. Adanya komitmen bersama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta mitra kerjanya untuk melaksanakan program dan kegiatan.
 - b. Berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan kerangka acuan kerja yang direncanakan
- 2.1.5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2024
 1. Terbatasnya personil (ASN) yang ada dan berkurang karena pensiun menyebabkan kurang optimal dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan;
 2. Peran dan Fungsi para pemangku kepentingan, lembaga non struktural (FKUB, BNK, FKDM, FPK, PPWK) yang perlu ditingkatkan.
- 2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan yang diambil berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas antara lain:

1. Terbatasnya personil (ASN) yang ada dan berkurang karena pensiun menyebabkan kurang optimal dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Hal ini diatasi dengan mengoptimalkan THL yang telah ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Penguatan koordinasi, kerjasama dan *networking*/jejaring dengan mitra kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Secara terinci rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, dapat terlihat dalam tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100%	100%	100%	90,11%	90,11%	100%	100%	100%
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tersusun	29 Dokumen	28 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	100%	28 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja, Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil PD Tahun 2020	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%				
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan Tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%				
		Jumlah Dokumen Renja Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%				
		Penyelenggaraan Forum PD	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3 Dokumen	3 Dokumen	100%	
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%				
		Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.01.03	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8.01.01.2.01.04	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja ROPK	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100% 100% 100%	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100% 100% 100%
		Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen Perubahan Perjarjian Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						17 Dokumen	17 Dokumen	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD (Laporan e Money)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen LKjIP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen TEpra	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan terlaksana	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	100%			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN tersedia	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						294 Orang/bulan	294 Orang/bulan	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 Laporan	1 Laporan	100%
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						13 Laporan	13 Laporan	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian terlaksana	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%
8.01.01.2.02.01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani	19 orang	19 orang	19 orang	19 orang	100%	19 orang	19 orang	100%
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						7 Dokumen	7 Dokumen	100%
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum terlaksana	8 layanan	8 layanan	8 layanan	8 layanan	100%	8 layanan	8 layanan	100%
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	6 Paket Pembelian	6 Paket Pembelian	6 Paket Pembelian	6 Paket Pembelian	100%	6 Paket Pembelian	6 Paket Pembelian	100%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						6 Paket	6 Paket	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Tersedia (kertas, amplop, bantalan stempel, binderclip, balpoint, odner, tinta printer, gunting, penggaris, penghapus, karbon, lem, pensil, snelhecter plastik, refil toner, flashdisk, pita mesin ketik, Pita Faximile, selotip, lakban	22 Jenis	22 Jenis	22 Jenis	22 Jenis	100%	22 Jenis	22 Jenis	100%
		Jumlah Komputer/PC tersedia	2 unit	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah UPS tersedia	2 unit	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah printer laserjet tersedia	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laptop/notebook tersedia	3 unit	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	52 Paket					13 Paket	13 Paket	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terbeli (pembersih lantai, pembersih kamar mandi, pewangi ruangan, sapu ijuk, sulak, sapu lidi, tisu, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi, pengki, keset, keranjang sampah, sabun cuci)	12 paket pembelian	12 paket pembelian	12 paket pembelian	12 paket pembelian	100%	12 paket pembelian	12 paket pembelian	100%
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						12 paket	12 paket	100%
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak (Map Berkop, BKP, SPPD, Disposisi, Sekat Folder, Box Arsip)	72 dokumen	18 dokumen	69 dokumen	69 dokumen	100%			
		Jumlah Penggandaan/Fotocopy	25400 lembar	12 lembar	25260 lembar	25260 lembar	100%			
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						4 paket	4 paket	100%
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/Surat Kabar Tersedia (2 media x 12 bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			100%
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan						350 Dokumen	350 Dokumen	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat, konsultasi, dan koordinasi luar daerah dalam Pulau Jawa	3 Orang	14 orang	11 orang	11 orang	100%			
		Frekuensi rapat, konsultasi, dan koordinasi luar daerah luar Pulau Jawa	4 Orang	9 orang	11 orang	11 orang	100%			
		Jumlah Minum Snack untuk Rapat	250 Orang	60 orang	180 orang	180 orang	100%			
		Jumlah Makan Minum untuk rapat	152 Orang	60 orang	180 orang	180 orang	100%			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20 Laporan	20 Laporan	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin terlaksana	-	-	-	-	-	16 layanan	16 layanan	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						16 unit	16 unit	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	6 layanan	6 layanan	6 layanan	6 layanan	100%	12 layanan	12 layanan	100%
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat Tersedia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Surat terkirim	650 lembar	-	600 lembar	600 lembar	100%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan	12 Laporan	100%
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang diterima atas kemanfaatan jasa air 1 rekening x 12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah bulan yang diterima atas kemanfaatan jasa listrik 1 rekening x 12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah bulan yang diterima atas kemanfaatan jasa telepon 1 rekening x 12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						36 laporan	36 laporan	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan Kantor di bayar	247 hari	247 hari	247 hari	247 hari	100%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan	100%
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah terlaksana	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	100%	12 layanan	12 layanan	100%
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Dinas terpelihara 2 unit x 2 kali	4 Paket Pemeliharaan	4 Paket Pemeliharaan	4 Paket Pemeliharaan	4 Paket Pemeliharaan	100%			
		Jumlah Mobil Dinas yang terbayar pajaknya	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100%			
		Jumlah Motor Dinas terpelihara 6 unit x 1 kali	6 Paket Pemeliharaan	6 Paket Pemeliharaan	6 Paket Pemeliharaan	6 Paket Pemeliharaan	100%			
		Jumlah Motor Dinas yang terbayar pajaknya	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100%			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						46 unit	46 unit	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan tahun (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer terfasilitasi pemeliharanya	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	100%			
		Jumlah Laptop/notebook terfasilitasi pemeliharanya	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	100%			
		Jumlah mesin ketik terfasilitasi pemeliharanya	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	100%			
		Jumlah Printer Terfasilitasi Pemeliharanya	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	100%			
		Jumlah Alat Korsik terfasilitasi pemeliharanya	1 set	1 set	1 set	1 set	100%			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						22 unit	22 unit	100%
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung terlaksana	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%			
		Jumlah Gedung Kantor yang terfasilitasi keamanannya	365 hari	365 hari	365 hari	365 hari	100%			
		Jumlah AC terfasilitasi pemeliharanya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 unit	1 unit	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	-	-	-	-	20 unit	20 unit	100%
8.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	-	-	-
8.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Evaluasi SOP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Pelayanan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian SPIP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
2.22.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	78 persen	-	-	-	-	72 persen	72 persen	100%
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Politik berbasis budaya	1 kali	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.22.08.2.09.10	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Sosialisasi Budaya Politik	1 angkatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.22.08.2.09.23	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah FGD Kebangsaan bagi OPD	1 angkatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	100%	-	75%		100%	80%	80%	100%
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan	26 kali	-	48 kali		100%	19 kali	19 kali	100%
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang memahami arti penting wawasan kebangsaan, cinta tanah air, nasionalisme, dan bela negara	500 orang	-	1900 orang	1900 orang	100%			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah generasi muda / pelajar yang memahami arti penting wawasan kebangsaan, nasionalisme dan bela negara	400 orang	-	200 orang	200 orang	100%			
		Jumlah Upacara/Peringatan Hari Besar yang diiringi Korps Musik	12 kali	-	8 kali	8 kali	100%			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						150 orang	150 orang	100%
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	82,5%	-	80%	80%	100%	80%	80%	100%
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah anggota/ pengurus parpol yang memahami tentang administrasi, hak, dan kewajiban sebagai anggota parpol	48 orang	48 orang	48 orang	48 orang	100%	48 orang	48 orang	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah parpol yang terfasilitasi bantuan keuangan	8 parpol	-	8 parpol	8 parpol	100%			
		Jumlah warga masyarakat yang memahami tentang politik dalam negeri	450 orang	200 orang	50 orang	50 orang	100%			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan						300 orang	300 orang	100%
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Situasi dan Kondisi Sosial Politik Didaerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman	76%	68%	68%	68%	100%	70%	70%	100%
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan dan LSM	8 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaffaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah anggota Ormas dan LSM yang memahami tentang pemerintahan dan pembangunan	400 orang	100 orang	100 orang	100orang	100%			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100%	-	75%	75%	100%	80%	150 orang	100%
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama	9 kali	-	35 kali	35 kali	100%	5 kali	5 kali	100%
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Masyarakat yang memahami arti penting kerukunan umat beragama	450 orang	850 orang	1700 orang	1700 orang	100%			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						150 orang	150 orang	100%
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	93%	77%	89%		100%	90%	90%	100%
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Fasilitasi Perumusan kebijakan teknis penanganan konflik Sosial	53 layanan	-	24 layanan	24 layanan	100%	24 layanan	24 layanan	100%
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah masyarakat yang memahami pencegahan dan penanganan konflik sosial	450 orang	75 orang	100 orang	100 orang	100%			
		Jumlah Dokumen RAD dan pelaporan penanganan konflik sosial	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%			
		Jumlah Kesepakatan Forkopimda	6 kesepakatan	-	-	-				
		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga						150 orang	150 orang	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah masyarakat yang memahami kewaspadaan dini masyarakat terhadap ATHG, terorisme, radikalisme dan Orang Asing	400 orang	100 orang	100 orang	100 orang				
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi dan laporan P4GN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
		Jumlah Dokumen Pelaporan Kewaspadaan Dini	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen				
		Jumlah masyarakat yang memahami bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	900 orang	100 orang	450 orang	450 orang				

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik						100 orang	100 orang	100%
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta P						14 Laporan	14 Laporan	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>outputs</i>)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						6 Dokumen	6 Dokumen	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pembantu kepala daerah yang mempunyai fungsi sebagai penunjang kesatuan bangsa dan politik. Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana sudah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

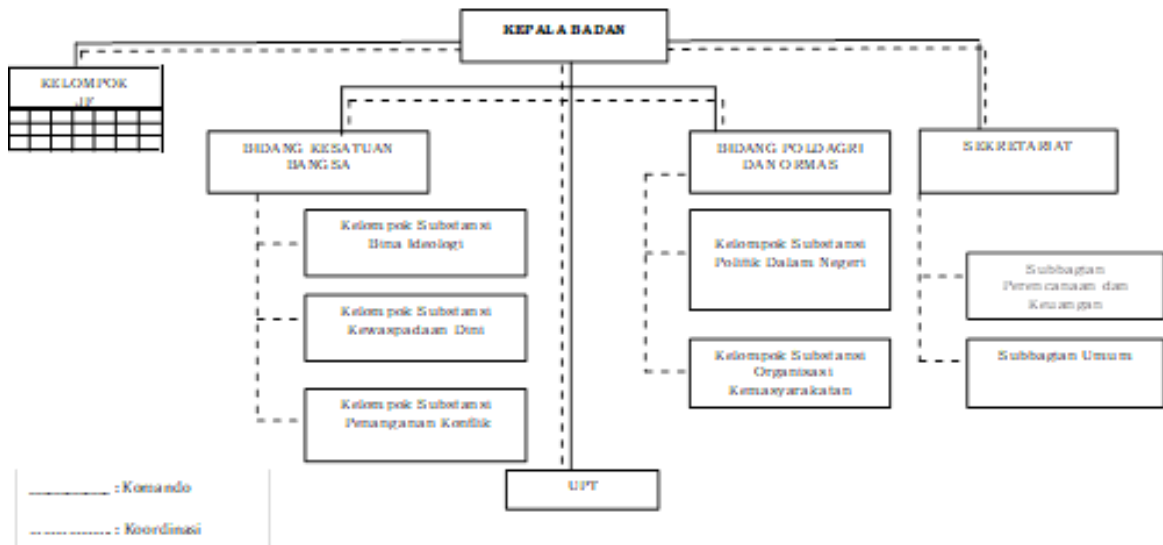
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU,SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	SASARAN IKU										
1.	Persentase konflik Sosial yang tertangani	Persen	88	89	90	91	88	89	90	91	
2.	Nilai AKIP PD	skor	-	80,05	80,10	80,15	-	80,05	80,10	80,15	
B.	SASARAN NON IKU										
1.	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	persen	75	80	85	90	75	80	85	90	
2.	Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	persen	80	80	80	82,5	80	80	80	82,5	
3.	Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	persen	65	68	70	72	65	68	70	72	
4.	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama	persen	75	80	85	90	75	80	85	90	
5.	Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	persen	88	89	90	91	88	89	90	91	
6.	Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	persen	-	-	72	74	-	-	72	74	
7.	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator (IKU,SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.	SPM										
	-										
D.	IKK										
	-										

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal-hal Kritis Terkait Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi utamanya dalam upaya menciptakan stabilitas kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan (ipoleksosbudhankam) di daerah dengan cukup baik. Hal tersebut tercermin dalam capaian indikator yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yakni persentase konflik sosial yang tertangani tergolong cukup berhasil. Hal tersebut terlihat dari IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu: Persentase konflik sosial yang tertangani (100%)

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya :

1. Belum optimalnya pemahaman kehidupan demokrasi (angka partisipasi politik masyarakat mengalami penurunan);
2. Adanya potensi konflik berbau SARA di masyarakat;
3. Adanya potensi peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai efek dari semakin ramainya kunjungan wisata dan mobilitas penduduk tinggi;
4. Adanya bibit-bibit ormas yang disinyalir tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan meresahkan masyarakat.
5. Menurunnya rasa nasionalisme dan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat

2.3.3 Dampak

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional :

1. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu masih rendah
2. Hilangnya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat
3. Kenyamanan dan ketertiban terganggu serta meresahkan masyarakat, generasi muda menjadi generasi yang tidak berkualitas baik secara mental maupun fisik.
4. Menjamurnya ormas-ormas yang tidak memiliki ijin, tidak ada kejelasan tentang legalitasnya serta tidak sesuai aturan yang berlaku yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
5. Merosotnya pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap Pancasila berdampak pada fenomena menurunnya rasa nasionalisme, kecenderungan perilaku dan kepribadian bangsa semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila, serta kehilangan jati diri sebagai suatu individu yang berakar dari nilai-nilai luhur budaya bangsa

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan stabilitas ideologi politik, ekonomi dan sosial budaya (ipoleksosbud) daerah, antara lain adalah :

1. Masyarakat Gunungkidul yang heterogen;
2. Pertumbuhan penduduk, perumahan baru dan tempat wisata/hiburan yang cukup signifikan;
3. Adanya dinamika budaya politik masyarakat;
4. Pengaruh globalisasi, budaya asing, teknologi informasi, liberalisme, westernisasi dan pasar terbuka;
5. Pengaruh ideologi trans-nasional, isu HAM;
6. Peredaran Narkoba yang meresahkan masyarakat;
7. Munculnya beberapa aksi kenakalan remaja yang mengarah pada penyimpangan moralitas.

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong penciptaan stabilitas ipoleksosbudhankam daerah, antara lain :

1. Partisipasi politik masyarakat Gunungkidul dalam Pemilu rata-rata 80%;
2. Sebagian masyarakat masih menjunjung tinggi kebudayaan jawa yang adiluhung;
3. Bahwa setiap warga negara berkewajiban turut serta dalam usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.

2.3.4 Rekomendasi dan Catatan Strategis

Mengacu agenda pembangunan nasional, indikasi tema pembangunan DIY, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024, akan melaksanakan prioritas tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;
- 2) Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di bidang kesatuan bangsa, ketahanan dan kewaspadaan nasional;
- 3) Meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik;
- 5) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM);
- 6) Meningkatkan kelembagaan daerah dalam penanganan konflik masyarakat;
- 7) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.

Prioritas tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menyikapi isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi Kabupaten Gunungkidul dalam bidang kesatuan bangsa, yaitu:

- 1) Perlunya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga akan meningkatkan profesionalisme aparat dan meningkatnya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah;
- 2) Perlunya perhatian terhadap permasalahan di bidang politik, hukum, HAM dan ketertiban, agar mampu mendorong terwujudnya peningkatan kesadaran politik masyarakat;
- 3) Perlunya penguatan organisasi kemasyarakatan/LSM sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka ikut memberdayakan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul;
- 4) Perlunya meningkatkan ketahanan dan kewaspadaan nasional dan daerah sebagai prasyarat stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
- 5) Perlunya penanganan konflik secara simultan dengan mengacu pada tindak lanjut implementasi Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- 6) Perlunya membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagai sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bela negara dan menjunjung tinggi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dasar ideologi Pancasila;
- 7) Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul merencanakan untuk melaksanakan 7 (tujuh) program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) subkegiatan dengan pagu indikatif Rp5.065.938.916,00

Dalam perkembangannya, berdasarkan analisis kebutuhan terdapat perlunya rasionalisasi pagu anggaran pada beberapa kegiatan

yang telah direncanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan pagu indikatif sebesar Rp48.504.093.587,00 yang dijabarkan dalam 7 (enam) program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) subkegiatan antara lain:

Adapun hasil review rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, adalah sebagai berikut :

- I. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan
 - a. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
 1. Subkegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya berdasarkan analisis kebutuhan terdapat penambahan menjadi sebesar Rp369.925.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp10.000.000,00
- II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berdasarkan analisis kebutuhan terdapat pengurangan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebesar Rp48.656.000,00 menjadi Rp25.917.500,00.
 2. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD terdapat pengurangan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp19.250.000,00 menjadi Rp789.950,00.
 3. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD terdapat pengurangan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD sebesar Rp0,00.
 4. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD terdapat pengurangan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp880,000,00 menjadi Rp0,00.
 5. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD terdapat pengurangan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp440,000,00 menjadi Rp0,00.
 6. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp2,410,000,00 menjadi sebesar Rp0,00
 7. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp800.000,00 menjadi Rp0,00
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berdasarkan analisis kebutuhan terdapat rasionalisasi anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp2.317.022.000,00 menjadi Rp1.578.303.879,00 karena Belanja Tambahan Penghasilan di anggarakan di BKPPD.
 2. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD anggaran terdapat pengurangan dari semula sebesar Rp2,000,000,00 menjadi Rp0,00
 3. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD terdapat

pengurangan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp5,600,000,00 menjadi Rp0,00.

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1. Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian terdapat rasionalisasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula sebesar Rp1,500,000,00 menjadi Rp0,00
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terdapat pengurangan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp3.000.000,00 menjadi Rp0,00
 - 2. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terdapat pengurangan anggaran semula sebesar Rp63,119,000,00 menjadi Rp0,00
 - 3. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga terdapat penambahan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp6.000.000,00 menjadi Rp0,00
 - 4. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terdapat pengurangan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula sebesar Rp14,200,000,00 menjadi Rp0,00
 - 5. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan terdapat pengurangan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp2.880.000,00 menjadi Rp0,00
 - 6. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terdapat penambahan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp77.120.000,00 menjadi Rp0,00
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terdapat penambahan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula sebesar Rp20.490.000,00 menjadi Rp24.682.500,00
 - 2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terdapat rasionalisasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp43.900.000,00 menjadi Rp41.339.050,00
 - 3. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terdapat penambahan anggaran semula sebesar Rp16.455.000,00 menjadi Rp19.742.500,00
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terdapat pengurangan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp65,913,000,00 menjadi Rp22.212.500,00

2. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berdasarkan analisis kebutuhan terdapat penambahan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula sebesar Rp6,660,000,00 menjadi Rp0,00
3. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terdapat pengurangan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp34,335,000,00 menjadi Rp128.887.500,00 karena adanya pemeliharaan Gedung kantor.
4. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tetap sebesar sebesar Rp0,00

III. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 1. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan semula sebesar Rp865.113.500,00, dan berdasarkan analisis kebutuhan menjadi sebesar Rp975.791.500,00
 2. Subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan terdapat penambahan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp87,400,000,00 menjadi Rp61.117.500,00

IV. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
 1. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah terdapat pengurangan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp109.044.972,00 menjadi Rp5.405.950,00
 2. Subkegiatan Pelaksanaan Monitoring Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah terdapat penambahan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp1.142.093.758,00 menjadi

Rp41.306.912.758,00. Karena pada terdapat Hibah KPU dan Bawaslu sebesar Rp40.000.000.000,00.

- V. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 1. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah terdapat perubahan anggaran dari RKPD semula Rp41.125.000,00 menjadi Rp55.300.000,00
- VI. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah terdapat penambahan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp38.400.000,00 menjadi Rp272.160.000,00
- VII. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - 1. Subkegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah terdapat penurunan semula Rp742.900.000,00 menjadi Rp0,00.
 - 2. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah terdapat penurunan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp154.381.000,00 menjadi Rp0,00
 - 3. Subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah terdapat penambahan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp28.900.000,00 menjadi Rp142.482.500,00
 - 4. Subkegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,

Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah terdapat perubahan anggaran semula Rp27.850.000,00 menjadi Rp9.975.000,0

5. Subkegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terdapat penurunan anggaran semula Rp142.470.000,00 menjadi Rp73.600.000,00

Untuk lebih jelasnya, hasil review rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Tahun 2024 dapat kita lihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Kabupaten Gunungkidul

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	74 %	22.050.000				74 Persen	369.925.000,00	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Politik berbasis	2 Kali		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Politik berbasis	2 Kali		
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya		Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1 Dokumen	10.000.000	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya		Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1 Dokumen	369.925.000,00	
	SEMUA URUSAN					SEMUA URUSAN					
	PROGRAM:					PROGRAM:					
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik	100%	2.752.930.158	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100%	1.841.875.379	

1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tersusun	28 Dokumen	72.736.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tersusun	29 Dokumen	26.707.450	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	48.656.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25.917.500	
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	19.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	789.950,	
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	300.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	880.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	0	
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	440.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	0	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	2.410.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	0	
g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	5 Laporan	800.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	5 Laporan	0	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi keuangan terlaksana	4 layanan	2.324.622.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi keuangan terlaksana	4 layanan	1.578.303.879	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/bulan	2.317.022.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 Orang/bulan	1.578.303.879	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	5.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	0	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 dokumen	1.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen	0	
a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	1.500.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen	0	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum terlaksana	10 layanan	166.319,158	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum terlaksana	10 layanan	0	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	63.119.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	0	
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	14.200.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	0	
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	730 Dokumen	2.880.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	350 Dokumen	0	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
f											
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Laporan	77.120.158	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	0	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan daerah terlaksana	6 layanan	80.845.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan daerah terlaksana	6 layanan	85.764.050	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.425.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24.682.500	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	43.900.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	41.339.050	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	16.520.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.742.500	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah terlaksana	12 layanan	106.908.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah terlaksana	12 Layanan	151.100.000	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	65.738.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	22.212.500	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	6.660.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	0	
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	29.940.000	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	128.887.500	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	4.570.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	20 Unit	0	
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	85%	87.400.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	90%	1.036.909.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan	11 Kali	87.400.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan	14 Kali	1.036.909.000	
a	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang	47.400.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang	975.791.500	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
b	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2355 Orang	40.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250 Orang	61.117.500	
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	80%	1.310.183.758	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	82,5%	41.312.318.708	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Pendidikan Politik Masyarakat	26 Layanan	1.310.183.758	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Pendidikan Politik Masyarakat	41 Layanan	41.312.318.708	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
a	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	298 Orang	167.595.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	600 Orang	5.405.950	
b	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 Laporan	1.142.588.758	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 Laporan	41.306.912.758	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	72%	42.125.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	72%	55.300.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Pembinaan Ormas dan LSM	10 Kali	42.125.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Pembinaan Ormas dan LSM	4 Kali	55.300.000	
a	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	42.125.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	55.300.000	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama	90%	45.600.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama	90%	272.160.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	3 Kali	45.600.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	4 Kali	272.160.000	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
a	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang	45.600.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	235 Orang	272.160.000	
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	91%	805.650.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	91 %	226.057.500	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Fasilitasi Perumusan kebijakan teknis penanganan konflik Sosial	25 Layanan	805.650.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Fasilitasi Perumusan kebijakan teknis penanganan konflik Sosial	28 Layanan	226.057.500	
a	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	27.600.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	0	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
b	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang	44.700.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	0	
c	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	250 Orang	54.400.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	395 Orang	142.482.500	
d	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	13 Laporan	20.700.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Laporan	9.975.000	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
e	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	658.250.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	652.300.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Hasil analisis kebutuhan dimaksud kemudian dipadukan dengan memperhatikan usulan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan melalui Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, serta Musrenbang Kabupaten. Dengan mempertimbangkan faktor skala prioritas, dana yang tersedia dan kemanfaatannya, maka berbagai aspirasi masyarakat tersebut dapat melengkapi usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat tercermin dalam program/kegiatan yang dibiayai dengan alokasi anggaran PIWK dan PIS, yang selengkapnya tersaji dalam tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8
USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pembinaan Ketahanan Masyarakat sbg upaya cegah dini dan deteksi dini ATHG	Gading	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.850.000	7.850.000	PIWK
2.	Pembinaan/ penyuluhan pencegahan dan penanganan konflik sosial sebagai upaya meminimalisir dampak timbulnya konflik sosial dan upaya penyelesaiannya	jurangjero, Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	1 Angkatan	7.850.000	7.850.000	PIWK
3.	Pembinaan/ penyuluhan pencegahan dan penanganan konflik sosial sebagai upaya meminimalisir dampak timbulnya konflik sosial dan upaya penyelesaiannya	Bolodukuh Lor, Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	1 Angkatan	7.850.000	7.850.000	PIWK
4.	Pembinaan Ketahanan Masyarakat sbg upaya cegah dini dan deteksi dini ATHG	Karangduwet	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.850.000	7.850.000	PIWK
5.	Pembinaan/ penyuluhan pencegahan dan penanganan konflik sosial sebagai upaya meminimalisir dampak timbulnya konflik sosial dan upaya penyelesaiannya	Karangduwet	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	1 Angkatan	7.850.000	7.850.000	PIWK

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pembinaan Politik Masyarakat sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan generasi muda	Giripanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Angkatan	7.285.000	7.285.000	PIS
2.	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan sebagai upaya Penguatan kapasitas pengurus Ormas dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan masyarakat	Kalurahan Semugih, Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Angkatan	7.285.000	7.285.000	PIS
3.	Pembinaan Politik Masyarakat sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan generasi muda	Kalurahan Semugih, Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Angkatan	7.285.000	7.285.000	PIS
4.	Pembinaan/ penyuluhan pencegahan dan penanganan konflik sosial sebagai upaya meminimalisir dampak timbulnya konflik sosial dan upaya penyelesaiannya	karangtengah, Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	1 Angkatan	8.010.000	8.010.000	PIS
5.	Penyuluhan P4GN sebagai upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Kepek	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	8.010.000	8.010.000	PIS

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	Pembinaan/ penyuluhan pencegahan dan penanganan konflik sosial sebagai upaya meminimalisir dampak timbulnya konflik sosial dan upaya penyelesaiannya	Playen	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	1 Angkatan	7.850.000	7.850.000	PIS
7.	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan untuk meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan, cinta tanah air, nasionalisme dan bela negara bagi masyarakat	Plembutan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Angkatan	7.850.000	7.850.000	PIS
8.	Pembinaan Kerukunan Umat beragama sebagai upaya meningkatkan dan menciptakan kerukunan di masyarakat	Grogol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan dan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Angkatan	8.010.000	8.010.000	PIS
9.	Pembinaan Ketahanan Masyarakat sbg upaya cegah dini dan deteksi dini ATHG	Beji, Ngawen, Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.850.000	7.850.000	PIS
10.	Pembinaan Kerukunan Umat beragama sebagai upaya meningkatkan dan menciptakan kerukunan di masyarakat	Katurahan Semugih, Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan dan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Angkatan	8.010.000	8.010.000	PIS

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	Penyuluhan P4GN sebagai upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Bedoyo Kidul RT01 RW06, Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul, 55892, Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	8.010.000	8.010.000	PIS
12.	Penyuluhan P4GN sebagai upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Pulutan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	8.010.000	8.010.000	PIS
13.	Pembinaan Politik Masyarakat sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan generasi muda	Pulutan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Angkatan	7.285.000	7.285.000	PIS

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024 yaitu : "*Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*". Sejalan dengan tema pembangunan nasional tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 menetapkan tema pembangunan sebagai berikut : "*Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di DIY*"

Dengan berpedoman pada tema pembangunan nasional dan tema pembangunan DIY serta dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan sinergi pembangunan daerah, Kabupaten Gunungkidul menetapkan tema pembangunan tahun 2024 : "*Optimalisasi Ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia* ".

Selanjutnya tema pembangunan tersebut, dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Peningkatan Ekonomi :
 - a. Investasi dan Pariwisata
 - b. Pengembangan Sektor Unggulan
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketentraman dan Ketertiban;
7. Reformasi Birokrasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan dan sasaran renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah yang tercermin dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 yang dikaitkan dengan kondisi dinamika Ipoleksosbudhankam yang berkembang di daerah.

Selanjutnya tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dijabarkan sebagaimana di bawah ini :

a. Tujuan PD Tahun 2021-2026

Tujuan yang akan dicapai, adalah :

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik masyarakat.

Tabel 3.1
Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan Tahun 2026
1.	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik masyarakat	Indek Konflik Sosial yang tertangani tahun 2026	73,38%

b. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra Tahun 2021- 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran Tahun 2024
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	91%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,15%

Berdasarkan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 359/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tercantum dalam tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU tahun 2024
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	91%

Selanjutnya berdasarkan IKU tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan indikator kinerja program dengan keputusan Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 13/KPTS/2022 sebagai berikut

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Program Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/Formulasi
1.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	$\frac{\sum \text{Jumlah peserta pembinaan dengan nilai diatas 70}}{\sum \text{jumlah peserta yang mengikuti pembinaan}} \times 100 \%$ Tipologi data:Non Kumulatif
2.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	$\frac{\sum \text{Jumlah peserta pembinaan dengan nilai diatas 70}}{\sum \text{jumlah peserta yang mengikuti pembinaan}} \times 100 \%$ Tipologi data:Non Kumulatif
3.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	$\frac{\sum \text{Jumlah penduduk yang mengikuti pemilu}}{\sum \text{Jumlah penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih}} \times 100\%$ Tipologi data : Non Komulatif
3.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	$\frac{\sum \text{Ormas yang aktif dlm kegiatan pemerintahan dan pembangunan}}{\sum \text{Ormas yang terdaftar}} \times 100\%$ Tipologi data : Non Komulatif
4.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase Pemahaman Masayrakat terhadap kerukunan umat beragama	$\frac{\sum \text{Jumlah peserta pembinaan dengan nilai diatas 70}}{\sum \text{jumlah peserta yang mengikuti pembinaan}} \times 100 \%$ Tipologi data:Non Kumulatif
5.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Presentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	$\frac{\sum \text{konflik sosial yang tertangani}}{\sum \text{konflik sosial yang terjadi}} \times 100 \%$ Tipologi data:Non Kumulatif
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten (akumulasi capaian kegiatan)	Rerata Capaian Indikator kinerja kegiatan x 100% Tipologi data:Non Kumulatif

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

Berdasarkan visi dan misi Bupati, maka prioritas pembangunan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, dengan sasaran daerah yaitu ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat.

2. Kebijakan anggaran

Sumber pendanaan yang diperoleh dari APBD Kabupaten sangat terbatas sehingga program dan kegiatan dengan prioritas anggaran diutamakan pada kegiatan pokok yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah sesuai pagu indikatif. Kebijakan atas pagu indikatif dilakukan melalui proses penganggaran, yaitu dengan memperkirakan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan prioritas pembangunan serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka pada tahun anggaran 2024, Badan Kesatuan Bangsa merencanakan 7 (tujuh) program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) subkegiatan. Rencana anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut disusun berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta prakiraan maju pada tahun anggaran berkenaan. Pada tahun 2024 belanja gaji ASN dan hibah/bansos dimasukkan dalam Renja Perangkat Daerah beserta pagu anggarannya sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024

No.	Uraian	Pagu PD (Rp)
1	2	3
1	Gaji Pokok ASN	1.221.732.886,00
2	Tunjangan Keluarga ASN	116.601.193,00
3	Tunjangan Jabatan ASN	126.350.000,00
4	Tunjangan Fungsional Umum ASN	33.250.000,00
5	Tunjangan Beras ASN	66.916.080,00
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.437.550,00
7	Pembulatan Gaji ASN	16.170,00
Total		1.578.303.879,00

Tabel 4.2
HIBAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

No.	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMILU	NILAI BANTUAN PERSUARA	JUMLAH BANTUAN (Rp)	PEMBULATAN BESARNYA BANTUAN (Rp)
1	2	3	4	5=(3x4)	6
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	107.225	2.506	268.705.850	268.706.000
2	Partai Nasdem	83.469	2.506	209.173.314	209.173.000
3	Partai Amanat Nasional	52.360	2.506	131.214.160	131.214.000
4	Partai Golongan Karya	50.208	2.506	125.821.248	125.821.000
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	42.807	2.506	107.274.342	107.274.000
6	Partai Kebangkitan Bangsa	42.533	2.506	106.587.698	106.588.000
7	Partai Keadilan Sejahtera	38.241	2.506	95.831.946	95.832.000
8	Partai Demokrat	25.700	2.506	64.404.200	64.404.000
	Total			1.109.012.758	1.109.012.000

Hasil perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 kami sajikan sebagai berikut :

Tabel 4.3

Sasaran dan Program/Kegiatan

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program / Kegiatan /Subkegiatan
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	I Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		a Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		II Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
		1 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
		2 Pelaksanaan Monitoring Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
		III Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		1 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		IV Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	V Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
		1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		4 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		5 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
		VI Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
		a Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
		1 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	VII Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
		a Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Subkegiatan
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	c Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		d Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		f Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		g Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

a. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dari tabel 4.3 tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan melaksanakan 7 (tujuh) program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) subkegiatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1 (satu) program difokuskan untuk penguatan kapasitas internal Perangkat Daerah dan 6 (enam) program dilakukan untuk mendukung visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Anggaran untuk melaksanakan 7 (tujuh) program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024.

Untuk lebih jelasnya kami paparkan rekapitulasi program dan kegiatan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.4

Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan	Program / Kegiatan /Subkegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
1	Ketentraman dan Ketertiban	I Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.036.909.000	
		a Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.036.909.000	
		1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	975.791.500	
		2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	61.117.500	
		II Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	41.312.318.708	
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	41.312.318.708	
		1 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	5.405.950	
		2 Pelaksanaan Monitoring Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	41.306.912.758	
		III Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	55.300.000	
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	55.300.000	
		1 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	55.300.000	

No	Prioritas Pembangunan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
		IV Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	272.160.00	
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	272.160.00	
		1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	272.160.00	
		V Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	226.057.500	
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	226.057.500	
		1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	
		2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	
		3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	142.482.500	
		4 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	9.975.000	
		5 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	73.600.000,	
		VI Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	369.925.000	
		a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	369.925.000	
		1 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	369.925.000	
		VII Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.841.875.379,	
		a Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	26.707.450	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.917.500	
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	789.950	

No	Prioritas Pembangunan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	
		b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.578.303.879	
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.578.303.879	
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	
		c Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	
		1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	
		d Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	
		4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	
		e Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.764.050,	
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.682.500,	
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.339.050	
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.742.500	
		f Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.100.000	
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.212.500	
		2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	
		3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	128.887.500	
		4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	

b. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024

Untuk lebih jelasnya mengenai rumusan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2024 akan kami paparkan dalam tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5
 Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan
 Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
Ketentraman dan Ketertiban	Ketentraman, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	91%	2.22.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	369.925.000	BAKESBANGPOL
					2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	369.925.000	BAKESBANGPOL
					2.22.08.5.07.18	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	369.925.000	BAKESBANGPOL
					8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.036.909.000	BAKESBANGPOL
					8.01.02.2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.036.909.000	BAKESBANGPOL
					8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	975.791.500	BAKESBANGPOL
					8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	61.117.500	BAKESBANGPOL
					8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	41.312.318.708	BAKESBANGPOL

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
Ketentraman dan Ketertiban	Ketentraman, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	91%	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	41.312.318.708	BAKESBANGPOL
					8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	5.405.950	BAKESBANGPOL
					8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	41.306.912.758	BAKESBANGPOL

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
Ketertaman dan Ketertiban	Ketertaman, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	91%	8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	55.300.000	BAKESBANGPOL
					8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	55.300.000	BAKESBANGPOL
					8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	55.300.000	BAKESBANGPOL
					8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	272.160.000	BAKESBANGPOL
					8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	272.160.000	BAKESBANGPOL
					8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	272.160.000	BAKESBANGPOL

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
Ketertaman dan Ketertiban	Ketertaman, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	91%	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	226.057.500	BAKESBANGPOL
					8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	226.057.500	BAKESBANGPOL
					8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	BAKESBANGPOL
					8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	BAKESBANGPOL
					8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	142.482.500	BAKESBANGPOL

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
Ketertarikan dan Ketertiban	Ketertarikan, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	91%	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	9.975.000	BAKESBANGPOL
					8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	73.600.000	BAKESBANGPOL

- c. Tabel rencana program dan kegiatan disajikan dalam tabel 4.7 sebagai berikut

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa da Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Tabel 4.7

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya		72%	369.925.000			72%	30.000.000
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Politik berbasis budaya		3 kali	369.925.000			2 kali	30.000.000
2.22.08.5.07.09	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	369.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	13.000.000
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik		100%	1.841.875.379			100%	2.792.603,104

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tersusun		29 Dokumen	26.707.450			28 Dokumen	71,974,000
8.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul,	4 dokumen	789.950,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	47,714,000
8.01.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	19,250,000
8.01.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	300,000
8.01.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	920,000
8.01.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	460,000
8.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Laporan	2,430,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
8.01.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 dokumen			900,000
8.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan terlaksan		4 layanan	1.578.303.879		100%			2,324,672,000
8.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	308 orang/bulan	1.578.303.879	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 bulan			2.317.022.000
8.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen			2,000,000
8.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 dokumen			5,650,000
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian terlaksana		1 layanan	0		7 dokumen			1,800,000
8.01.01.2.05.03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 dokumen			1,800,000
8.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum terlaksana		10 layanan	0		100%			189,402,104

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 paket	3,000,000
8.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 paket	69,250,000
8.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 paket	6,000,000
8.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 paket	14,350,000
8.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350 dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		350 dokumen	2,880,000
8.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 laporan	93,922,104

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana		6 layanan	85.764.050			100%	81,030,000
8.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	24.682.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 laporan	20,675,000
8.01.01.2.08.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 dokumen	41.339.050	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		36 dokumen	43,900,000
8.01.01.2.08.01.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	19.742.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 dokumen	16,455,000
8.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah terlaksana	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 layanan	151.100.000			12 layanan	111,725,000
8.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 unit	22.212.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		46 unit	65,950,000
8.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 set	10,650,000
8.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	128.887.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 unit	30,125,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 unit	5,000,000
8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap wawasan kebangsaan		90%	1.036.909.000			85%	84,325,000
8.01.02.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan		14 kali	1.036.909.000			11 kali	84,325,000
8.01.02.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 orang	975.791.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 orang	100,500,000
8.01.02.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Orang	61.117.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2355 Orang	50,000,000
8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada		82,5%	41.312.318.708			80%	1,289,507,758

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.03.02.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pendidikan Politik Masyarakat		41 layanan	41.312.318.708			26 layanan	1,289,507,758
8.01.03.02.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 Orang	5.405.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3050 Orang	146,245,000
8.01.03.02.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 laporan	41.306.912.758	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 laporan	1,143,262,758

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan		72%	55.300.000			70%	69,725,000
8.01.04.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Ormas dan LSM		4 kali	55.300.000			10 kali	69,725,000
8.01.04.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Orang	55.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		460 Orang	69,725,000
8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap kerukunan umat beragama		90%	272.160.000			85%	93,800,000
8.01.05.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Pembinaan Kerukunan Umat Beragama		4 kali	272.160.000			3 kali	93,800,000
8.01.05.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	235 orang	272.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2080 orang	93,800,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah		91%	226.057.500			90%		893,100,000
8.01.06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Fasilitasi Perumusan kebijakan teknis penanganan konflik Sosial		28 layanan	226.057.500				20 layanan	893,100,000
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen		55,200,000
8.01.06.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 orang		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 orang		45,200,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.06.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	395 orang	142.482.500.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		250 orang	85.200.000
				14 laporan	9.975.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 laporan	55.200.000
8.01.06.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 laporan					
8.01.06.2.01.06.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	73.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	652.300.000
TOTAL					45.114.545.587				5.241.513.362

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, dan program kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini berdasarkan pada RPJMD serta Renstra PD. Pagu alokasi Badan Kesbangpol pada tahun 2024 sebesar Rp45.114.545.587,00 dengan rincian: DAU murni sebesar Rp302.080.000,00, Gaji PNS Rp1.578.303.879,00, Forkopimda Rp456.000.000,00, Dais Rp369.925.000,00, Paskibraka Rp975.791.500,00, Bantuan Keuangan Parpol Rp1.109.012.758,00, Hibah KPU/Bawaslu Rp40.000.000.000,00, Rehab sedang Bakesbangpol Rp100.000.000,00, THL Rp223.432.450,00. Dengan pagu tersebut terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp352.722.000,00 yang terdiri dari Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) tidak mencukupi karena jumlah THL kami ada 10 (sepuluh) orang sedangkan anggaran yg tersedia baru cukup untuk 9 (sembilan) orang), DAU Murni sebesar Rp.302.080.000,00, dan pagu Forkopimda sebesar Rp.456.000.000,00 tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang diampu OPD kami karena, sebagian besar kegiatan pada 2024 adalah untuk belanja honorarium tim, dan Anggaran untuk Desk Pemilukada belum teranggarkan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian

yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari, 26 Juli 2023


JOHANNEKO SUDARTO


SUNARYANTA